



# KLIPING KORAN

Sumber : Kompas, Republika, Koran Tempo, Suara Pembaharuan, Media Indonesia, Surabaya Pos, Surya, **Malang Post**, Bhirawa, Suara Indonesia, Koran Pendidikan, Majalah Tempo, Majalah GATRA, Jawa Pos/ Radar Malang, Seputar Indonesia, Pena Pendidikan ...

Tahun : 2017 .....

Bulan : JAN, FEB, **MAR**, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOV, DES

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 **31** hal .....

## Cegah Korupsi, Izin Perjalanan Dinas

### Dirancang Online

**MALANG-** Untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) menerapkan pelayanan izin online. Pelayanan perizinan PDLN secara online ini, sekarang dapat diakses melalui website [simple.sitneg.go.id](http://simple.sitneg.go.id). Kemensekneg memberikan dua akun pada perizinan pegawai internal Kemensekneg, pimpinan perguruan tinggi dan Kopertis dan Direktorat Jendral Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk perijinan dosen, tenaga

kependidikan dan mahasiswa.

"Perizinan PDLN online ini sudah berlaku per tiga Januari 2017. Kami sekarang memberikan sosialisasi pada UM, sebab civitas akademika UM sering melakukan perjalanan dinas luar negeri," kata Kasubag Kerjasama Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti, Anis Apriliawati.

Dia menjelaskan, dengan sistem online ini perizinan PDLN akan semakin mudah, dan juga lebih cepat.

"Kalau biasanya untuk perizinan PDLN biasanya lama sampai tiga bulan lebih, sekarang permohonan izin dapat disam-

paikan paling lambat tiga minggu sebelum keberangkatan. Juga lebih mudah sebab bisa dilakukan dengan online," lanjutnya.

Disisi lain, Kepala bagian Hukum Kerjasama dan Layanan Informasi, Ahmad Sarwani mengatakan, dengan adanya perijinan PDLN online, civitas akademika dapat dengan transparan melakukan pendataan. Hal tersebut akan meminimalisir adanya korupsi dalam perjalanan dinas.

"Nanti anggaran untuk perjalanan luar negeri akan lebih transparan, dan tujuan negaranya juga akan diketahui. Jadi ini

langkah yang strategis agar civitas tidak menggunakan perjalanan dinasnya dengan sembarangan, sebab kami juga bisa mengontrol nantinya," katanya.

Selain itu, perjalanan dinas ke luar negeri hanya dilakukan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi instansi.

"Harus benar-benar selektif, transparan dan menghasilkan manfaat maksimal bagi daerah, misalnya untuk pertukaran pelajar, penelitian, kerjasama dengan universitas di luar negeri, dan bukan untuk plesir," tambahnya. (yun/oci)